

H.M. HUDORI

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN PENGUATAN KESATUAN BANGSA

Abstrak:

Munculnya konflik-konflik sosial yang berbau SARA di beberapa wilayah Indonesia seperti Ambon, Kupang dan Pontianak serta semakin merebaknya peredaran dan penggunaan Narkoba di kalangan remaja, membuat banyak orang mempertanyakan tentang efektivitas pendidikan agama yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah. Pengajaran agama yang selama ini diberikan justru memperkuat rasa eksklusivitas tiap kelompok agama sehingga menimbulkan radikalisme agama. Hal ini tentunya justru melemahkan rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama sebagai bangsa Indonesia.

Dalam umat Islam sendiri muncul beberapa gerakan radikalisme, yakni: ekstrim kanan, yang mempunyai tujuan membentuk negara yang berideologikan agama (Islam) dengan cara-cara kekerasan (pemberontakan); dan ekstrim kiri, yakni golongan yang ada dalam masyarakat yang bertujuan menggantikan ideologi negara dengan paham Marxis-Leninis untuk membentuk negara yang memiliki paham komunis.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, maka dibutuhkan solusi yang tepat. Menurut penulis, langkah-langkah solusi tersebut adalah: meningkatkan pemahaman agama dan menjalin hubungan harmonis antar umat beragama, meningkatkan kompetensi pendidik, memperbaiki kesejahteraan pendidik, mengatasi keterbatasan tenaga didik (guru), menyempurnakan materi pendidikan agama dan menambah sarana dan prasarana pembelajaran.

Kata Kunci: *Problem Umat, Ekstrim Kanan, Ekstrim Kiri, Mutu Pendidikan.*

PENDAHULUAN

A. DASAR-DASAR PEMIKIRAN

Dalam UUD 1945 alinea keempat dikatakan bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga tercantum dalam sila I (pertama) Pancasila. Ini berarti bahwa kelompok-kelompok anti Tuhan di Indonesia seperti komunis tidak bisa hidup apalagi

berkembang di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Sesuai Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966 Inti nilainya adalah tercipta rasa persatuan dan kesatuan guna mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat yang religius memiliki keyakinan yang heterogen, dan sangat bervariasi tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agamanya. Ini bisa membawa berbagai dampak dalam kehidupan mereka bukan saja kepada hal yang positif tetapi juga kepada hal yang negatif yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan bangsa.

UUD 1945 pasal 29 menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan agama masing-masing. Ini memberikan indikasi kepada masyarakat Indonesia untuk menghormati dan menghargai terhadap perbedaan agama itu. Walaupun Pancasila dan UUD 1945 merupakan konsensus nasional, sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam bangsa, kenyataan dilapangan menunjukkan sebaliknya.

Kondisi di masyarakat kita sering mengalami pasang surut, sering aman, harmonis dan kondusif namun sering muncul gangguan yang merusak kondisi-kondisi antar umat beragama, intern umat beragama maupun dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga bisa menghalangi tercapainya tujuan nasional. Ajaran agama difahami secara sempit sehingga agama itu hanya berintikan kepada masalah *ubudiah* yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Mereka masa bodoh dengan orang lain di luar lingkungannya. Aktivitas di luar itu dianggap tidak sesuai dengan agama dan tidak bernilai agama, ini melahirkan fanatisme agama dan mendorong munculnya radikalisme keagamaan.

Mereka sering lupa bahwa kebahagiaan itu hanya bisa tercapai apabila bisa terpenuhinya kebutuhan rohani yang berintikan nilai spiritual dan kebutuhan jasmani yang berintikan material. Pada hakekatnya semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati dan saling menghargai sesama umat manusia walaupun berbeda agama. Semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, itu bisa tercapai apabila stabilitas nasional terjamin, yang intinya adalah terpenuhinya aspek kehidupan manusia.

Tujuan Pendidikan Nasional menurut UU no. 2 tahun 1989 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu

pengetahuan dan keterampilan, kepribadian serta bertanggungjawab terhadap masa depan bangsa dan negara.

Dari tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pendidikan agama adalah membina keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi luhur peserta/masyarakat.

Tugas ini tidaklah ringan karena kenyataannya pelaksanaan pendidikan agama sampai saat ini nampaknya lebih menekankan aspek transformasi pengetahuan agama kepada peserta didik dan masih kurang memperhatikan proses internalisasi nilai dan keterampilan beragama sehingga peserta didik mungkin mendapatkan pengetahuan agama yang cukup banyak akan tetapi kurang mampu melaksanakan nilai-nilai agama terutama ajaran moralnya seperti kejujuran, kesopanan, penghargaan kepada orang lain dan toleransi kepada umat beragama lain dan sebagainya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai kerusuhan yang berbau SARA seperti Aceh, Ambon, Kupang, Makasar, Pontianak, Mataram yang melibatkan anak-anak usia sekolah. Di samping itu maraknya peredaran dan penggunaan NARKOBA, minuman keras, pergaulan bebas dan tawuran antar pelajar yang marak di kota-kota besar menunjukkan bahwa pendidikan agama yang dilaksanakan selama ini baik di sekolah, keluarga dan masyarakat belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Apabila kerawanan-kerawanan tersebut di atas tidak segera diatasi bukan tidak mustahil akan menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa serta ketahanan nasional.

Oleh karena itu perlu upaya-upaya yang lebih seksama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dalam masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kaitannya dengan ketahanan nasional.

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan agama yang dirasakan selama ini di antaranya adalah masih rendahnya kualitas tenaga pendidik, rendah pemahaman masyarakat terhadap agama yang mereka anut, belum harmonisnya hubungan antar umat beragama.

B. PROBLEMA UMMAT ISLAM DALAM PENDIDIKAN AGAMA

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang masalah tersebut di atas adalah: "*Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk untuk*

meningkatkan kualitas pendidikan agama di dalam masyarakat dalam rangka menunjang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kaitannya dengan ketahanan nasional".

Kenyataan yang ada baik pada masyarakat, aparat maupun materi pendidikan agama terdapat kesenjangan dengan keadaan yang diinginkan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman agama masyarakat;
2. Masih rendahnya keharmonisan antar umat beragama;
3. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik agama;
4. Masih rendahnya kesejahteraan pendidik agama;
5. Kurangnya jumlah pendidik agama;
6. Kurang proposionalnya materi kurikulum pendidikan agama;
7. Kurangnya jam pelajaran pendidikan agama di sekolah;
8. Kurang mendapat perlakuan yang sama antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dari pemerintah;

Di antara faktor pendukung utama upaya pelaksanaan dan peningkatan kualitas pendidikan agama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kaitannya dengan ketahanan nasional adalah adanya peraturan perundangundangan seperti Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, UU No. 2 Tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional KMA No. 70 dan 77 Tahun 1978 tentang penegakan tri kerukunan umat beragama dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 yang mengatur pelaksanaan penyiaran agama dan lain sebagainya.

Berbagai perangkat lunak berupa peraturan dan perundang-undangan yang melandasi dan mengatur pelaksanaan pendidikan dan penyiaran agama tersebut dalam pelaksanaannya masih mendapatkan berbagai faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Ideologi, pada dasarnya ideologi bangsa Indonesia "Pancasila" apabila dilaksanakan dengan baik dan benar memberi tempat dan menjadi rambu yang sangat baik dalam pelaksanaan pendidikan agama yang dapat menopang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta Ketahanan Nasional.
- b. Politik, perkembangan politik dalam negeri yang makin demokratis dan reformis dalam berbagai bidang kehidupan yang tengah dilaksanakan bangsa Indonesia pada saat ini apabila dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dapat memberikan suasana yang kondusif bagi pendidikan agama.

- c. Ekonomi, keadaan ekonomi Indonesia yang mulai pulih serta terpilihnya pemerintahan baru secara demokrasi memberikan legitimasi yang lebih kuat, dapat menumbuhkan kepercayaan dalam dan luar negeri. Pulihnya ekonomi Indonesia saat ini diharapkan dapat mendorong makin meningkatnya pelaksanaan pendidikan agama.
- d. Sosial Budaya, dilihat dari segi sosial dan budaya, bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang sangat agamis dan toleran. kondisi ini sudah barang tentu dapat memberi tempat bagi tumbuh suburnya pelaksanaan pendidikan agama.
- e. HANKAM, makin kokohnya stabilitas pertahanan dan keamanan dapat memberikan suasana yang kondusif terhadap stabilitas ekonomi yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan agama sehingga dapat berhasil mencapai sasaran yang diharapkan.

2. Faktor yang menghambat

- a. Geografi, kenyataan negara Indonesia terdiri dari \pm 17.000 pulau besar dan kecil yang dipisahkan oleh lautan dan selat sangat menyulitkan mobilitas pelaksanaan pendidikan agama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Sebaliknya memudahkan intervensi asing yang dapat menggerogoti persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Demografi, jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak \pm 200 juta yang penyebarannya dan pemahaman keagamaannya yang tidak merata, juga dapat menghambat proses pelaksanaan pendidikan agama yang relevan dengan kebutuhan.
- c. Globalisasi, globalisasi informasi dan komunikasi telah menghilangkan sekat-sekat budaya dasar bangsa sehingga informasi budaya dari negara bagian yang belum tentu sesuai dengan budaya agama bangsa Indonesia mengalir bagaikan air bah yang dapat mengerosi hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pendidikan agama.
- b. Aspek-aspek Ipoleksosbudhankam dapat juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan dan peningkatan kualitas pendidikan agama apabila krisis multidimensional yang dihadapi bangsa ini tidak segera diatasi dengan baik.

C. BEBERAPA ANCAMAN YANG DIHADAPI UMMAT ISLAM DAN BANGSA INDONESIA

1. Golongan Ekstrim Kanan

Golongan ekstrim kanan ini adalah individu atau kelompok/golongan yang mempunyai tujuan membentuk negara yang berideologi agama dengan cara radikal atau kekerasan.

Golongan ini lebih mementingkan formalitas dan legalitas agama, serta suka memancing bentrokan dengan umat beragama lain. Golongan ini cukup heterogin karena terdiri dari orang-orang yang berbeda pola pikir, orientasi dan tingkah laku politiknya sehingga tidak memiliki konseptual yang utuh dan gerakannya sering bersifat emosional dan situasional dengan menggunakan jargon jargon jihad fisabilillah. Karena sifat emosional yang mereka miliki seringkali dapat ditunggangi oleh golongan ekstrim lainnya.

Kegiatan mereka sering memanfaatkan kegiatan dakwah, khotbah, ceramah dan pengajian agama yang diisi dengan visi politik praktis untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Mereka sering menyebarkan pamflet melakukan teror sabotase, memprovokasi massa untuk bertindak anarkhi dan lain-lain.

2. *Golongan Ekstrim Kiri*

Golongan ini adalah individu atau kelompok/golongan di dalam masyarakat yang untuk mencapai tujuan berpedoman pada faham marxis dan Leninis dengan tujuan membentuk negara komunis.

Aspirasinya diperjuangkan secara rasional konseptual dan berjangka panjang. Gerakannya berbentuk konspirasi. Mereka mempunyai kader-kader yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada partai dan revolusi. Dan untuk mencapai tujuan tersebut mereka sering kali menghalalkan segala cara, melakukan penyusupan, penggalangan dan menggunakan propaganda, infiltrasi sabotase teror penyebaran pamflet dan sebagainya.

Dalam melaksanakan perjuangan mereka tidak mengenal istilah gagal apabila masih lemah mereka menggunakan taktik bermuka dua, kompromi, infiltrasi, penetrasi/penyusupan, penggalangan, manipulasi dan disinformasi. Apabila telah kuat mereka akan selalu menggunakan cara-cara kekerasan.

Dan apabila gerakannya mengalami kegagalan mereka menggunakan gerakan bawah tanah dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Di samping itu mereka juga berusaha melakukan transformasi ideologi pada kader-kader muda, disinformasi peristiwa-peristiwa yang menyudutkan PKI pada Tahun 1926, 1948 dan 1965 kemudian juga melakukan penggalangan melalui karya tulis atau media cetak dan elektronik, mernanfaatkan kesenjangan sosial, dan mengorganisir kriminalitas, banditisme dan kerusuhan massa.

3. *Golongan Ekstrim Lainnya*

Golongan ini adalah individu atau kelompok/golongan dalam masyarakat yang untuk mencapai tujuannya berpedoman pada berbagai

faham yang bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan tujuan membentuk masyarakat/negara yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945 dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Golongan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu liberalis dan separatis. Kegiatan golongan liberalis di bidang politik mengutamakan dominasi mayoritas disetiap lembaga perwakilan, dalam bidang ekonomi menitik beratkan persaingan bebas serta ciri kapitalis dan di bidang sosial budaya menuntut kebebasan individu, HAM dan sebagainya

Golongan ini sebagian besar adalah kaum intelektual yang menyebabkan mereka mudah menyusupkan pemikiran mereka dalam konsep kenegaraan. Kegiatan mereka dalam bidang fisik seperti menyebarkan isu, melakukan diskusi ilmiah dan pemaparan artikel-artikel yang cenderung mendiskreditkan pemerintah. Sedangkan kegiatan dalam bidang non fisik berupaya penyusupan konsep, penerapan disiplin ilmu dari negara liberal tanpa seleksi dan menarik simpati intelektual muda dan sebagainya.

Sedangkan golongan separatis melandasi gerakannya pada fanatisme sempit orientasi kedaerahan, dengan tujuan membentuk negara sendiri. Kegiatan golongan ini meliputi upaya-upaya mempengaruhi, memaksa dan mengancam masyarakat untuk mendukung ide separatisme yang mereka kembangkan. Mereka sering melakukan teror, sabotase dan gerombolan bersenjata serta berusaha memancing perhatian luar negeri dengan menjelek-jelekan Indonesia di forum Internasional.

Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa ekstrim kanan, ekstrim kiri dan ekstrim lainnya dengan karakter-karakternya tidak mustahil dapat menyusup terhadap pendidikan agama sehingga dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional. Oleh karena itu golongan ekstrim segala bentuknya harus diwaspadai dalam pelaksanaan pendidikan agama yang relevan dengan kebutuhan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV mengandung tujuan Negara Republik Indonesia yaitu *melindungi segenap Bangsa Indonesia di seluruh tumpah darah Indonesia (1), mewujudkan kesejahteraan umum (2), mencerdaskan kehidupan bangsa (3), dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (4)*.

Upaya mewujudkan tujuan negara tersebut sangat erat hubungannya dengan eksistensi masyarakat Indonesia, yang heterogen.

Untuk menjembatani kondisi tersebut peran pendidikan agama sangat dominan, di samping unsur-unsur lainnya yang dalam uraian ini

tetap mengacu pada pembahasan sebelumnya, dengan orientasi masyarakat, pendidik dan materi pendidikan agama, diharapkan akan muncul secara signifikan masalah-masalah yang dihadapinya, sekaligus upaya-upaya pemecahannya.

D. PERSOALAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama, sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, yang diharapkan adalah terciptanya hubungan komunikasi yang harmonis, serta saling menguntungkan bersama, di samping sejauh mana pendidik dalam melaksanakan tugas profesinya serta bagaimana materi pendidikan agama itu sendiri.

Kondisi obyektif ini mengisyaratkan adanya kesenjangan dan kesadaran terhadap pemahaman agama yang dianutnya sangat rendah, yang pada akhirnya bila tidak diantisipasi secara arif dan bijaksana akan menjadi potensi kerawanan dan ketegangan sekaligus sebagai konflik baik intern umat beragama maupun antar umat beragama. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap stabilitas nasional karenanya diantisipasi secara dini, agar tidak berakibat langsung terhadap menurunnya kondisi masyarakat terhadap ketahanan nasional. Dengan demikian perlu diantisipasi dengan melakukan usaha-usaha yang bersifat menyeluruh, terencana dan berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat tentang ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

Kemampuan dan penghayatan serta pengamalan ajaran-ajaran agama yang dianut pemeluknya akan menjiwai sikap dan perilaku umat beragama dalam kehidupan masyarakat, sehingga kerawanan dan kesenjangan dapat diminimalisir mungkin, dengan demikian akan nampak adanya keharmonisan sejati antara umat beragama dalam kehidupan masyarakat.

Di samping upaya tersebut faktor penting lainnya adalah sejauh mana dukungan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan pemerintah, yang mengacu kepada kepastian hukum atau supremasi hukum di samping kesejahteraan hukum oleh, setiap warga negara dan penyelenggara negara.

Unsur lain yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan agama adalah para pendidik agama, baik pada lingkungan sekolah (formal) maupun lingkungan luar sekolah (informal dan nonformal).

Menyadari bahwa aspek penting dari pendidikan adalah para pendidik, sedangkan pendidik adalah mereka yang karena keahlian dan kemampuannya diserahi amanat oleh pemerintah, orang tua maupun

masyarakat dalam membina, mendidik dan mengajarkan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan yaitu terwujudnya unsur kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam kerangka ini eksistensi pendidik sangat erat dengan unsur kompetensi pendidik, kesejahteraan pendidik maupun kuantitas pendidik.

Pendidik yang menyadari akan profesinya tentunya selalu bertekad menekuni dan mengembangkan profesinya secara sempurna dan berkesinambungan, dengan sikap dan tekad pembenahan profesi tersebut mengisyaratkan jati diri seorang profesional.

Seorang pekerja profesional selalu dituntut memiliki kompetensi yang memadai, yang dalam hal ini adalah kompetensi personal, profesional dan sosial, disamping itu adanya tekad dan kesadaran untuk bersikap produktif baik masalah material maupun immaterial.

Dengan demikian dapat difahami bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan agama masih belum optimal, karena kurangnya kompetensi pendidik, kesejahteraan pendidik serta kuantitas pendidik agama. Integritas aspek pada umumnya dan khususnya pendidikan agama menjadi kunci dalam menentukan kualitas pendidikan agama itu sendiri, sehingga tidak akan mencapai hasil optimal bila aspek pendidikan itu masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, sehingga menuntut strategi yang memungkinkan pemecahannya secara optimal.

Indikator kompetensi pendidik teraplikasi dalam kompetensi personal, profesional dan sosial. Kompetensi personal adalah jati diri seseorang pendidik yang pada hakekatnya dapat dijadikan pusat identifikasi oleh peserta didik. Keberadaan pendidik selalu menciptakan kondisi yang kondusif dalam membangkitkan minat dan kesetiaan peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Dengan kompetensi personal tentunya seorang pendidik menyadari akan keberadaannya, sehingga ia selalu mewaspadaikan dirinya dari hal-hal negatif. Pendidik menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu pada fungsinya sebagai agen pembaharuan. Hal mendasar dari kompetensi personal adalah faktor kepribadian dari pendidik, di antaranya keteladanan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran. Hal tersebut sangat erat dengan mentalitas pendidik sehingga selalu menjadi tuntutan bagi pendidik guna memilikinya sekaligus akan menjadi identifikasi oleh peserta didik dalam kehidupannya.

Kompetensi profesional adalah kemampuan terhadap bidang tugas yang ditekuninya. Kemampuan ini akan dicapai dalam waktu yang panjang baik melalui pengalaman pada jenjang pendidikan yang diikutinya maupun pada masa pengamalannya dalam kehidupan

masyarakat. Ciri-ciri seorang pekerja profesional adalah mencintai profesinya (1), selalu mengembangkan profesinya (2), menjadi kebutuhan masyarakat (3), selalu mengalami perubahan (4), memiliki kode etik tertentu. Ciri-ciri ini tentunya sangat mendasar bagi seorang profesional, untuk selalu membenahinya. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan pendidik yang simpatik dan energik itu, simpati artinya selalu disenangi dan disegani karena pendidik memiliki kewibawaan atas profesinya, sedangkan energik adalah pendidik memiliki etos kerja yang tinggi dalam menekuni profesinya.

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik dalam interaksi edukatifnya selalu mengandung nilai-nilai sosial yang diharapkan ikut mempengaruhi kepribadian peserta didik.

Disadari bahwa aktivitas pendidikan adalah aktivitas sosial, artinya baik proses maupun tujuannya adalah muatan sosial. Saling memberi dan menerima, saling menyadari akan kelebihan dan kekurangan, sehingga saling melengkapi dan menyempurnakan kekurangan di antara personal yang terlibat. Dengan kondisi ini akan tumbuh dan berkembang semangat dan kesetiaan sosial diantara sesama mereka.

Faktor lain yang penting peningkatan kualitas pendidikan agama adalah kesejahteraan pendidik, serta jumlah pendidik yang masih terbatas (utamanya pada daerah terpencil).

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama sangat ditentukan oleh kesejahteraannya. Dengan kesejahteraan yang layak tentunya tidak akan mempengaruhi aktivitas pendidik dengan menjalani usaha sampingan lainnya.

Selanjutnya dengan terbatasnya tenaga pendidik sudah dapat dipastikan bahwa baik proses maupun hasil dari pendidikan akan mengalami kemunduran atau tidak optimal, karena banyaknya tugas yang akan diembannya, serta sulit dilaksanakan dengan baik dan sempurna.

Kondisi tersebut sangat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM), bila tidak diantisipasi lebih awal akan berdampak langsung terhadap disintegritasi bangsa sekaligus mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional sebagai wujud gatra pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya adalah masalah materi pendidikan agama. Materi pendidikan agama selain merupakan alat, sekaligus juga sebagai tujuan, sehingga materi pendidikan agama sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama. Dalam kerangka ini materi yang dibutuhkan adalah materi yang komprehensif serta mampu mengakomodir cita-cita dan tujuan pendidikan agama itu, yang antara lain; menciptakan peserta

didik yang beriman dan bertaqwa (1), memiliki akhlak budi pekerti yang luhur (2), beramal shaleh (3), dan dapat mencintai dan menghargai hasil budaya bangsa dan tanah airnya (4). Cita-cita dan tujuan dimaksud bila tidak diantisipasi maka tetap akan menjadi kerawanan, yang pada era reformasi ini sangat sering muncul ke permukaan, karena materi pendidikan agama serta hasil pencapaiannya banyak menekankan aspek kognitif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa materi pendidikan agama yang dilaksanakan selama ini belum proporsional antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, disertai alokasi waktu yang relatif singkat atau terbatas.

Mencermati keadaan ini, tentunya dibutuhkan pemikiran dan perencanaan bidang kependidikan agama dalam mengantisipasinya. Hal itu antara lain dengan menyeimbangkan bahkan menekankan aspek afektif dari materi pendidikan agama, sehingga dapat berpengaruh langsung terhadap sikap dan mental peserta didik yang diharapkan.

Kondisi kekerasan, seperti penjarahan, pemerkosaan dan lain sebagainya, yang sangat memprihatinkan bangsa kita dewasa ini akan dapat dinetralisir secara baik dan berkesinambungan. Karena melalui proses pendidikan agama, peserta didik diharapkan memahami, menghayati dan mengamalkan dan kehidupannya.

Selain faktor materi yang harus proporsional, komprehensif dan fungsional, juga faktor pengalokasian waktu yang harus memadai dan berkesinambungan, demi membantu dan mendorong peserta didik dalam ikatan proses yang terus menerus yang diharapkan berpengaruh positif terhadap sikap dan mental.

Bila materi pendidikan agama dan pengalokasian waktu belajar telah memadai akan membantu pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya, sekaligus mampu menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, walaupun berada dalam kebhinekaan sebagai wujud wawasan nusantara dalam astra gatra, dan bila sebaliknya tentunya menjadi peluang terjadinya AGHT yang berdampak terhadap terhadap runtuhnya wawasan nusantara sekaligus terhadap ketahanan nasional.

E. LANGKAH-LANGKAH SOLUSI

Uraian-uraian di atas perlu disikapi dengan upaya pemecahan secara tepat dan berkesinambungan, yang dalam tulisan makalah ini akan dikemukakan sebagai berikut:

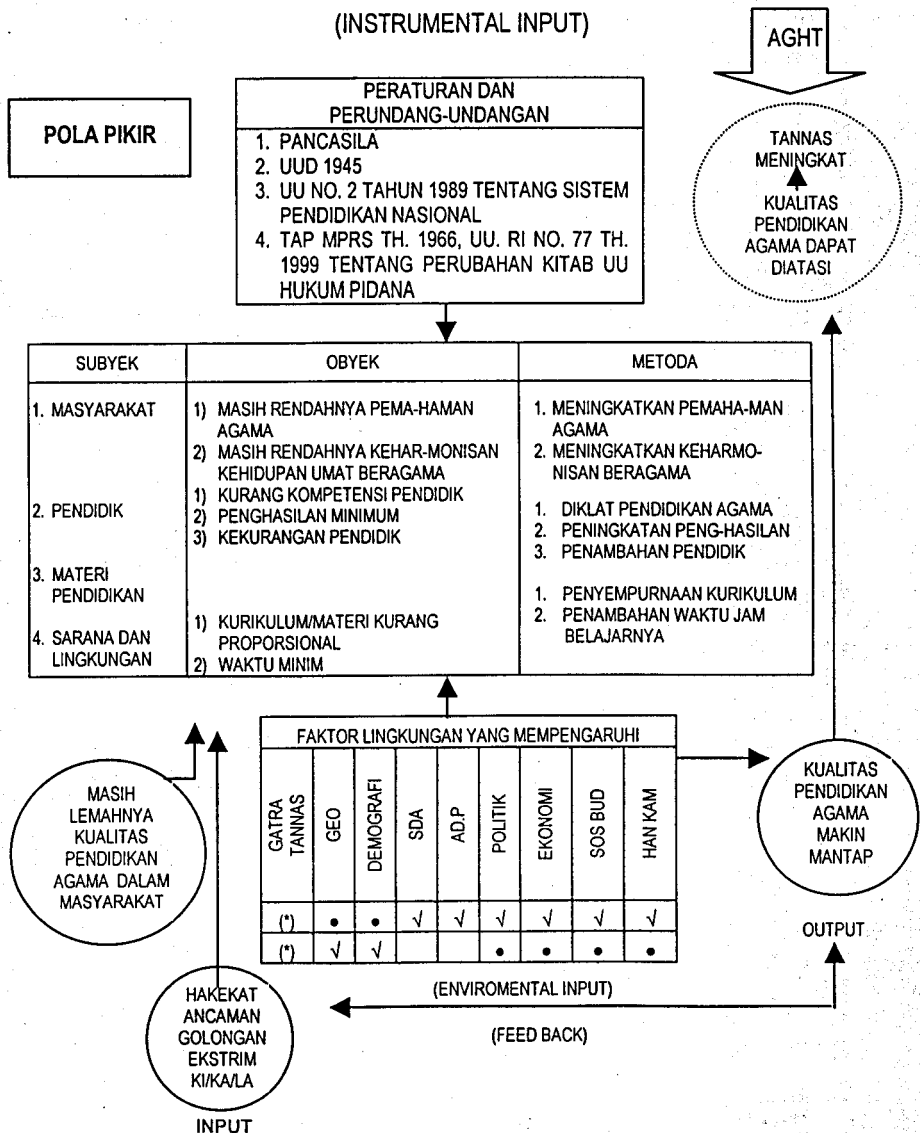
1. Meningkatkan pemahaman agama dan keharmonisan hubungan umat beragama.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa agama, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha, perlu dibangun pemahaman dan kesadaran sejauh mana keberadaan agama-agama tersebut, dan bagaimana berinteraksi secara harmonis dalam komunitas bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini sangat dibutuhkan upaya antisipatif, melalui kesadaran dan penghayatan agama masing-masing, diskusi dan dialog antar umat beragama serta peranan aparat pemerintah dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kehidupan umat beragama seperti keputusan Menteri Agama tentang Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama, dan penciptaan kondisi kehidupan umat beragama yang kondusif

2. Meningkatkan kompetensi pendidik
Hal-hal penting dari upaya dimaksud adalah meningkatkan jenjang pendidikan pada jenjang yang lebih tepat, pelatihan atau penataran tentang profesi serta seminar-seminar tentang kependidikan agama, disamping pembinaan dan pembenahan jatidiri seorang pendidik untuk memiliki integritas personal, profesional dan sosial.
3. Memperbaiki kesejahteraan pendidik
Faktor kesejahteraan pendidik ikut mempengaruhi tugas kariernya, untuk itu agar diberikan tunjangan atau gaji yang memadai sehingga para pendidik selalu tekun dalam menghadapi tugasnya. Disamping penciptaan budaya produktifitas bagi para pendidik agama, seperti menghasilkan karya tulis, yang akan dihargai dengan imbalan atau upah yang memadai pula.
4. Mengatasi terbatasnya pendidik
Terbatasnya tenaga pendidik di sekolah maupun di luar sekolah merupakan hambatan yang sangat besar, terutama pada daerah-daerah terpencil, untuk itu kiranya pemerintah memprioritaskan pengadaan tenaga pendidik agama agar memenuhi kebutuhan pendidik agama dimaksud.
5. Menyempurnakan materi pendidikan agama
Upaya dimaksud adalah perlu penyempurnaan secara proporsional kurikulum pendidikan agama sehingga adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara aspek-aspek dari materi pendidikan agama. Di samping perlu pengalokasian waktu yang relatif memadai bagi proses pembinaan pendidikan agama bagi peserta didik. Dan dengan materi tersebut kiranya dapat merubah sikap dan tingkah laku peserta didik.

6. Menambah Sarana dan Media Pendidikan

Pemerintah harus memandang sama antara lembaga pendidikan yang berdasarkan keagamaan dan non keagamaan. Karena lembaga yang berdasarkan keagamaan maupun non keagamaan dua-duanya berdasar pada sistem yang sama yaitu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN No. 2 TH 1989) yang meliputi tujuan dan fungsi yang pada prinsipnya sama yaitu mencerdaskan bangsa.



F. PENUTUP

Setelah mengadakan identifikasi masalah, menganalisis dan mengadakan pembahasan yang ada serta upaya pemecahannya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di kalangan masyarakat masih rendah pemahaman agama dan keharmonisan kehidupan umat beragama.
2. Masih rendahnya kualitas (kompetensi) dan kuantitas pendidik agama, baik metodologi keilmuan akhlak, dan moral serta faktor kesejahteraan.
3. Belum proposional, komprehensif serta fungsional materi pendidikan agama, antara ubudiah dan akhlak, nilai-nilai muamalah didalam kurikulum pendidikan agama.
4. Sarana dan media pendidikan masih jauh memadai.
5. Lingkungan masyarakat, dan sekolah masih sangat perlu ditingkatkan dalam mendukung terhadap pendidikan.
6. Perlu adanya upaya peningkatan pemahaman agama dan keharmonisan kehidupan umat beragama secara komprehensif dan proporsional melalui berbagai bentuk seperti silaturahmi, dialog, sarsehan, maupun forum komunikasi antar umat beragama.
7. Dalam penerimaan Guru Pendidikan Agama diharapkan pemerintah memperhatikan komprehensif, mental dan moral calon Guru Pendidikan Agama yang sesuai dengan kebutuhan, disamping itu memperhatikan kesejahteraan guru.
8. Dalam penyempurnaan kurikulum pendidikan hendaknya memperhatikan prinsip proporsional, komprehensif maupun fungsional

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, Depdikbud

TAP MPRS/XXV/1966 dan Undang-undang RI No. 27 tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Hukum Pidana

KMA No. 70 dan 77 Tahun 1978 tentang Pendidikan Agama Departemen Agama Republik Indonesia

SKB Menteri Agama dan Mendagri No. 1 tahun 1979 tentang Penyiaran Agama

Buku Kumpulan Pointers Materi Ceramah Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Setbid III BAKORSTANAS tahun 2000 TARPADNAS Angkatan XVII Departemen.

H.M. Hudori adalah dosen Jurusan Tarbiyah STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten", Serang